

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Fadhilla Dwi Dewanti  
dhilladewanti@gmail.com  
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The research aimed to examine the effect of human resources competence, effectiveness of local financial accounting system, and accrual basis understanding on the punctuality of government financial statement in Surabaya. While, the research was quantitative. Moreover, the population was Surabaya Local Official Organization. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. Additionally, the data were primary which taken from questionnaires. Respondents are regional governments officials, every agencies were represented by 5 people, namely head of department and accounting staff or financial administration of Surabaya Local Official Organization. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The research result concluded human resources competence, effectiveness of local financial accounting system, and accrual basis understanding had positive effect on the punctuality of government financial statement in Surabaya. In brief, by having competence in recording and auditing government financial statement and its implementation of local financial accounting system as effective and suitable with government objectives; also with better accrual basis understanding the punctuality of financial statement would be much improved.*

*Keywords: human resource, local financial accounting system, accrual basis, punctuality of financial statement.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemahaman basis akrual terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner atau angket. Responden adalah aparatur pemerintah daerah, setiap dinas diwakili oleh 5 orang yaitu kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah serta pemahaman basis akrual yang baik mampu meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan.

Kata kunci: sumber daya manusia, SAKD, basis akrual, dan ketepatanwaktuan laporan keuangan.

### PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan (*reporting entity*) diharuskan untuk membuat laporan keuangan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban karena: (a) Kekuasaan dan pengendalian sumber-sumber yang signifikan ada pada pemerintah; (b)

Kesejahteraan dan ekonomi rakyat tergantung pada penggunaan sumber-sumber yang signifikan oleh pemerintah; (c) Manajemen dan pemilik sumber-sumber tersebut dijalankan terpisah. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) ke BPK paling lambat diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu 31 Maret untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. BPK harus menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD dengan tujuan menghasilkan LKPD audited dengan waktu maksimal enam bulan sejak tahun anggaran berakhir. Pada PP No. 71 Tahun 2010 juga telah dijelaskan bahwa ketepatan waktu laporan keuangan adalah ketersediaan informasi bagi para pembuat keputusan saat dibutuhkan sebelum informasi yang ada pada laporan keuangan kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Ketepatan waktu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan mengingat bahwa LKPD yang telah diaudit oleh BPK adalah dasar dari pemerintah daerah untuk membuat draft APBD, sehingga keterlambatan penyajian LKPD dapat mengurangi relevansi serta manfaat dalam penggunaan laporan keuangan. BPK dalam melaksanakan tugasnya menghasilkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II). LHP yang dihasilkan BPK pada semester I adalah hasil dari laporan keuangan yang dikirimkan pemerintah pusat/daerah secara tepat waktu, sedangkan semester II adalah hasil dari keterlambatan pengiriman laporan keuangan oleh pemerintah pusat/daerah.

Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan kapabilitas sebagai entitas pelaporan dalam mewujudkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil baik yang didapatkan Pemerintah Kota Surabaya juga memunculkan tantangan baru bagi Pemkot Surabaya untuk kedepannya. Tantangan yang timbul adalah tuntutan untuk mempertahankan ketepatan waktu dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang telah berhasil dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Tuntutan ini dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah dengan menjaga kualitas faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman basis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: (1)Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya; (2)Apakah efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya; (3)Apakah pemahaman basis akrual berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya; (2) Untuk menguji pengaruh efektivitas standar akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya; (3) Untuk menguji pengaruh pemahaman basis akrual terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

## TINJAUAN TEORI

### *Agency Theory (Teori Keagenan)*

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi

(akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

### **Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Nordiawan (2006:35) berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Sistem akuntansi pemerintah

harus menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Efektivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerjanya. Bastian (2006) menyatakan bahwa dalam penyusunan sistem akuntansi untuk suatu organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting berikut: (1) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan; (2) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan; (3) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan.

### **Basis Akrua**

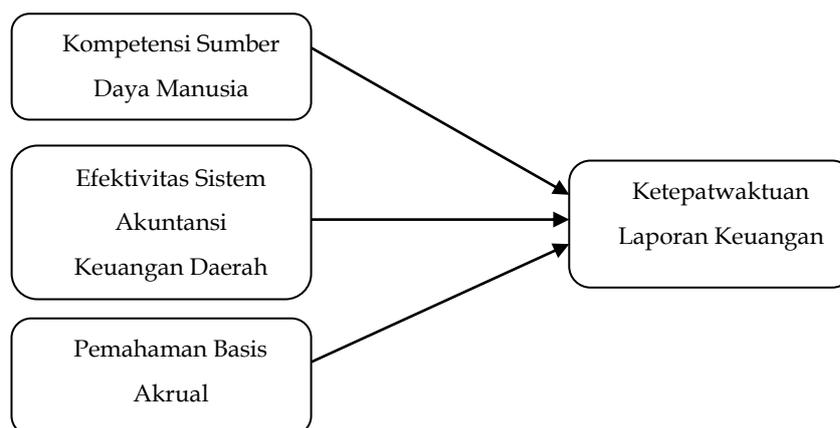
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibuat dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan ditujukan untuk bisa memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Segala informasi yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan suatu entitas termuat dalam laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan adalah Pemerintah, termasuk DPR/DPRD selaku badan legislatif, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pemeriksa laporan keuangan, lembaga pengawas, pihak yang berperan sebagai pemberi donasi maupun ikut dalam memproses donasi, dan masyarakat. Dilihat dari pengguna laporan keuangan, maka pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan pembuat laporan pertanggungjawaban tidak bisa merancang suatu laporan keuangan berdasarkan kebutuhan satu pengguna saja.

### **Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa ketepatanwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatanwaktuan menggambarkan informasi yang diinginkan dengan informasi pelaporan. Apabila informasi tidak dilaporkan dengan tepat waktu maka informasi tersebut akan kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

### **Model Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang berhubungan antara variabel-variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman basis akrual terhadap variabel dependen yaitu ketepatanwaktuan laporan keuangan. Model penelitian dibuat dengan tujuan agar mempermudah pemahaman atas masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan**

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh (2013), Setyowati *et al.* (2016) dan Wati *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian-penelitian tersebut menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan ketepatan waktu laporan keuangan dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.

#### **Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu: 1) Tertib, 2) Taat pada peraturan perundang-undangan, 3) Efektif, 4) Efisien, 5) Ekonomis, 6) Transparan, 7) Bertanggungjawab, 8) Keadilan, 9) Kepatutan, 10) Manfaat untuk masyarakat. Pemerintah harus mengawasi efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan mengandung prinsip-prinsip tersebut, sehingga informasi pada laporan keuangan daerah memiliki manfaat bagi pengambil keputusan disaat yang tepat. Jika sistem ini belum bisa diterapkan dengan baik maka akan menghambat penyajian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menyimpulkan bahwa efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan hasil hipotesis:

H<sub>2</sub>: Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.

## **Pengaruh Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Perubahan PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), harus dilaksanakan oleh lingkungan pemerintah yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi pada lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman merupakan salah satu hambatan dalam penerapan SAP berbasis akrual (Tickell, 2010). Kartikasari (2013) menyatakan bahwa tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Pemahaman yang kurang mengenai SAP berbasis akrual juga dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk menyajikan LKPD kepada BPK RI. Hambatan yang mungkin terjadi adalah laporan keuangan pemerintah daerah tidak disampaikan dengan tepat waktu. Ekatama (2107) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman basis akrual berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan hasil hipotesis:

H<sub>3</sub>: Pemahaman Basis AkruaI Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2014:35). Menurut Sugiyono (2008), penelitian kausal komparatif (kausatif) adalah tipe penelitian hubungan sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh antar suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih sebab dalam proses pengumpulan informasi, peneliti menentukan kriteria narasumber. Kriteria yang telah disusun oleh peneliti yaitu: (1) Pegawai yang melakukan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD Kota Surabaya; (2) Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD Kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuisisioner dalam pengumpulan data. Kuisisioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2014:199). Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang diukur.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatanwaktuan laporan keuangan, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman basis akrual.

## **Definisi Operasional Variabel**

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dan menyelesaikan tugas tersebut dengan efektif dan efisien. Variabel ini diukur menggunakan instrument kuisisioner dalam bentuk skala likert 5 poin. Variabel ini diukur menggunakan 3 indikator dari kuesioner Sudiarianti (2015) yaitu: (1) Pengetahuan; (2) Keahlian; (3) Perilaku.

### **Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus berjalan dengan efektif untuk menghasilkan laporan keuangan dengan ketepatanwaktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan media kuisisioner dengan skala likert 1-5. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Kurniawan (2019) yaitu: (1)Asas umum pelaksanaan anggaran setelah disahkan; (2) Prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan daerah; (3) Prosedur pelaksanaan anggaran belanja daerah; (4)Prosedur pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.

### **Pemahaman Basis Akrua**

Pemahaman standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu pemahaman individu mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah mengenai standar akuntansi pemerintah. Suatu entitas yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP No. 71 Tahun 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Variabel ini menggunakan seperangkat kuisisioner dengan skala likert 1-5. Variabel ini diukur menggunakan 2 indikator yang digunakan oleh Pristiani (2015) yaitu: (1) Pemahaman umum; (2)Pemahaman struktur.

### **Ketepatanwaktu Laporan Keuangan**

Ketepatanwaktu merupakan variabel dependen pada penelitian ini yang berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatanwaktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Pada variabel dependen ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan seperangkat kuisisioner dengan skala likert poin 1-5. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan oleh Puspaningsih (2017) yaitu: (1) Tersedia ketika dibutuhkan; (2) Pelaporan secara sistematis; (3) Selesai dan disampaikan tepat setelah tahun anggaran berakhir.

## **Teknik Analisis Data**

### **Uji Kualitas Data**

Dalam menentukan kualitas data yang diperoleh dari jawaban para responden digunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji Validitas mengukur suatu kuisisioner menggunakan coefficient correlation pearson yang berarti bahwa pengukuran ini menghitung korelasi antara nilai masing-masing butir pertanyaan dengan total nilai. Ghazali (2005:42) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas, diantaranya adalah: (1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan dikatakan valid; (2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pernyataan dikatakan tidak valid. Uji Reliabilitas menggunakan Skala bertingkat digunakan untuk mencari reliabilitas instrument. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan metode Alfa Cronbach, dengan kriteria Alfa Cronbach dari masing-masing variabel lebih dari 0,60 maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan.

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis ini dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data dengan memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati serta data demografi responden. Analisis deskriptif memberikan penjelasan bagaimana perilaku individu (responden) dalam kelompok. Ghozali (2009) menyatakan bahwa statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini berguna untuk mendapatkan pengaruh variabel bebas (yang mempengaruhi) terhadap variabel terikat (Umar, 2010:220). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah:

$$KLK = a + b_1KSDM + b_2ESAKD + b_3PBA + e$$

Keterangan:

KLK : Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi dari variabel independen

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

ESAKD : Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

PBA : Pemahaman Basis Akrua

e : *Error Term*

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian lolos uji asumsi klasik. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah data penelitian harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas dan heterokedastisitas. Maka dari itu, sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006). Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu: (1) Uji Normalitas adalah suatu pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji distribusi normal antara model regresi, variabel pengganggu dan residual. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov- Smirnov. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5%, maka  $H_0$  dinyatakan diterima dan data terdistribusi normal, (2) Uji Heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Uji ini dapat dilakukan menggunakan grafik plot dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas, (3) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Proses deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang dinyatakan bebas multikolinearitas memiliki nilai tolerance diatas 0,1 atau nilai VIF dibawah 10.

### **Pengujian Model**

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ ) yang

nilainya antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

### Uji Kelayakan (Uji F)

Nilai F regresi (ANOVA) adalah alat yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan F > 0,05 maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (b) Jika nilai signifikansi F  $\leq$  0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : (1) Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi t  $\leq$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Basis AkruaI serta variabel dependen Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan adalah valid, karena nilai pada corrected item total correlation (r hitung) lebih dari nilai rtabel yang diketahui sebesar 0,2006. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel penelitian yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Basis AkruaI dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya adalah reliabel, karena nilai alpha cornbach's masing-masing variabel lebih dari 0,60.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

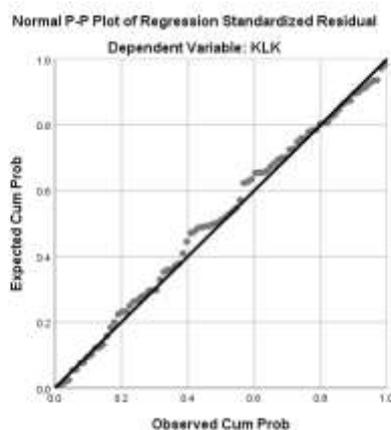
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua variabel tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji yang dilakukan untuk mengetahui normalitas data dapat menggunakan uji statistik "Kolmogorov Smirnov" pada nilai unstandardized residual. Model regresi akan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila kriteria nilai "Asymp Sig" (2 tailed) lebih besar dari 0,05. Tabel dibawah merupakan hasil perhitungan uji normalitas pada penelitian ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov-Smirnov Z	0,798
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,548

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi (nilai probabilitas) yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,548. Nilai signifikansi yang dihasilkan berarti bahwa distribusi terjadi secara normal, sehingga regresi linier berganda dapat dilakukan. Grafik normal probability plot dibawah ini juga akan menunjukkan nilai signifikansi yang terdistribusi normal:

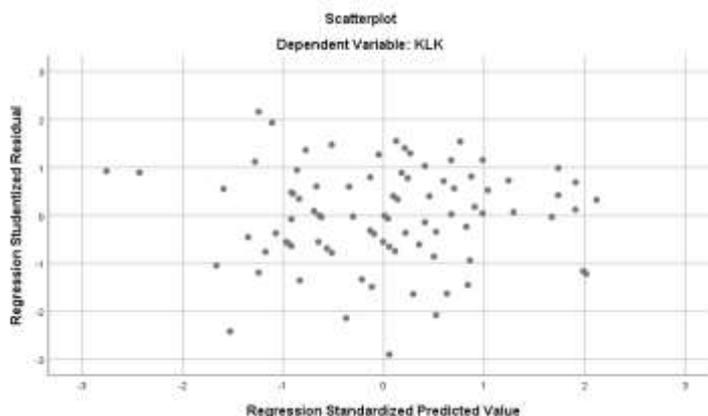


**Gambar 2**  
**Grafik Pengujian Normalitas Data**  
Sumber: Data Primer diolah, 2020

Grafik *p*-plot diatas menunjukkan bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum. Prob.*), maka dapat disimpulkan pendekatan grafik model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Prediksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksikan dan sumbu X adalah hasil residual. Dasar- dasar analisisnya: (a) Apabila ada titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian mengecil) maka telah terjadi heterokedastisitas; (b) Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Sumber: Data Primer diolah, 2020**

Pada gambar diatas dapat dilihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang terlihat jelas serta menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Grafik diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas pada model regresi.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 dan sebaliknya, jika *VIF* < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Tabel dibawah ini akan menunjukkan hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Bebas	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
KSDM	0,855	1,169	Tidak terjadi multikolinearitas
ESAKD	0,537	1,861	Tidak terjadi multikolinearitas
PBA	0,586	1,706	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Nilai *tolerance* pada setiap variabel independen yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan angka lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda berguna untuk melihat pengaruh variabel yang digunakan pada model penelitian yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Basis Akrual terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak, sehingga dapat dilakukan analisis regresi berganda. Perhitungan data yang telah dilakukan menghasilkan persamaan regresi linier berganda seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Persamaan Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

		Unstandardized Coefficients	
Model		B	Std. Error
1	(Constant)	0,331	0,341
	KSDM	0,365	0,60
	ESAKD	0,204	0,90
	PBA	0,369	0,94

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Persamaan yang timbul dari hasil perhitungan data diatas yaitu:

$$KLK = 0,331 + 0,365KSDM + 0,204ESAKD + 0,369 PBA$$

Penjelasan mengenai persamaan regresi linier berganda yaitu: (1) Nilai koefisien regresi untuk variabel KSDM bernilai 0,365, yang berarti bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (KLK); (2) Nilai koefisien regresi untuk variabel ESAKD bernilai 0,204, yang berarti bahwa Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (ESAKD) berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (KLK); (3) Nilai koefisien regresi untuk variabel PBA bernilai 0,369, yang berarti bahwa Pemahaman Basis Akrua (PBA) berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (KLK).

### Uji Kelayakan Model

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

*R-square* atau yang biasa disebut dengan koefisien determinasi menunjukkan persentase besarnya pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengolahan data koefisien determinasi (R<sup>2</sup>):

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,768a	0,589	0,576	0,24884

Predictors: (Constant), PBA, KSDM, ESAKD  
 Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien *R-square* yang dihasilkan sebesar 0,589 yang berarti variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Basis Akrua sebesar 58,9% sedangkan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

### Uji Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji model regresi yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Basis Akrua terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan. Nilai

signifikansi F yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model layak untuk diuji. Begitu juga sebaliknya, pengujian dikatakan tidak layak apabila nilai signifikansi F kurang dari 0,05. Tabel dibawah akan memperlihatkan hasil uji statistik f pada penelitian ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,178	3	2,726	44,027	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	5,697	92	0,062		
	Total	13,875	95			

a. Predictors: (Constant), PBA, KSDM, ESAKD  
 b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan tingkat signifikansi (*level of significan*) uji F sebesar 0,000. Nilai tersebut diartikan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Basis Akrual terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan karena diindikasikan adanya hubungan antar variabel.

**Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji ini dilaksanakan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi apabila signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	0,331	0,341		0,971	0,334
KSDM	0,365	0,60	0,439	6,077	0,000
ESAKD	0,204	0,90	0,207	2,273	0,025
PBA	0,369	0,94	0,342	3,915	0,000

a. Dependent Variabel: KLK

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 0,365. Hal ini menunjukkan hipotesis diterima dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan. Variabel Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi 0,025 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 0,204. Hal ini menunjukkan hipotesis diterima dan variabel Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan. Variabel Pemahaman Basis Akrual memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisien regresi 0,369. Hal ini menunjukkan hipotesis diterima dan variabel Pemahaman Basis Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hasil pada pengujian yang telah dilakukan terkait pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan tepat waktu. Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Peningkatan kompetensi pada sumber daya manusia adalah salah satu cara pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dengan tepat waktu. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan berkompeten karena sebagian besar pegawai bidang keuangan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan serta menyatakan setuju atas pernyataan tentang penyusunan laporan keuangan secara baik serta dapat memahami siklus akuntansi dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah (2014) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui sejauh mana suatu entitas pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan tepat waktu.

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$  yang berarti bahwa variabel Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Efektivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar nilai kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerjanya. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu prosedur yang meliputi tahapan awal pengumpulan data transaksi pemasukan dan pengeluaran suatu entitas sampai dengan dilakukannya proses pelaporan keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi yang belum diterapkan secara efektif akan menghambat penyusunan laporan keuangan pemerintah dan dapat mengakibatkan menurunnya ketepatanwaktuan laporan keuangan disampaikan dan relevansi untuk pengambilan keputusan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan telah berjalan efektif karena sebagian besar pegawai bidang keuangan menyatakan setuju atas pernyataan tentang asas umum dan prosedur pelaksanaan anggaran belanja daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hakim (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus diterapkan sesuai dengan SAP dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Wati *et al.* (2014)

dan Kurniawan (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pemahaman Basis AkruaI terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh Pemahaman Basis AkruaI terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa Pemahaman Basis AkruaI berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Basis akruaI merupakan metode pencatatan yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang pencatatan laporan keuangan berbasis akruaI dikeluarkan untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang memuat tentang pencatatan berbasis kas. Pemahaman basis akruaI merupakan salah satu kunci ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang baik, maka pegawai bagian keuangan tidak akan memerlukan waktu yang lama dalam melakukan proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Pemahaman basis akruaI pada pegawai bagian keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan baik karena sebagian besar pegawai bidang keuangan menyatakan setuju atas pernyataan tentang pencatatan transaksi berbasis akruaI dan pembuatan laporan keuangan berbasis akruaI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ekatama (2017) yang menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman basis akruaI, maka laporan yang dihasilkan berkualitas dan dapat diandalkan karena didalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Mariana (2019) yang menyatakan bahwa Pemahaman Basis AkruaI dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada data yang terkumpul dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu Kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pemahaman basis akruaI berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah serta pemahaman basis akruaI yang baik akan mampu meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya lebih memperluas populasi dan sampel penelitian dengan meneliti Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat secara teknis dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat lebih luas; (2) Pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya diharapkan untuk tetap menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga informasi yang dimuat tidak akan kehilangan nilainya bagi

para pengguna; (3) Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang tidak digunakan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Ekatama, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hakim, A. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)
- Humairoh, I. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember).
- Kartikasari, D. 2012. Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Jurusan Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Kurniawan, A. 2019. Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mariana, S. 2019. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurillah, A.S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 1(1): 2337-3806.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 59 Tahun 2007 *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pristiani. 2015. Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Jabatan (Studi Pada Dinas Se-Kabupaten Pematang). Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Puspitaningsih, V.D.A. 2017. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD (Studi Empiris pada SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Setyowati, L., W. Istihika, dan R.D. Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja* 20(2): 1-14.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Tickell, G. (2010). *Cash To Accrual Accounting: One Nations Dilemma*. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(11).

Umar, H. 2010. *Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*. Gramedia. Jakarta.

Wati, K.D.H., N. Trisna, dan N.K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Volume 2.1. Universitas Pendidikan Ganesha.